

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2019 DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018-2023

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2019	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG	TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018-2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018-2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
Menimbang:	Menimbang:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (4). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;	a. Bahwa sesuai dengan Pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar, yaitu mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2019	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2021
b. bahwa visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018-2023 perlu dijabarkan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;	b. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dampak pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19), maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.	c. Bahwa berdasar pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
Mengingat:	Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah "Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);	2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah "Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2019	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2021
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);	4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);	5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);	6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2019	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2021
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);	10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);	11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara	12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2019	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2021
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);	Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);	13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);	14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);	15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2019	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2021
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);	Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13).	17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018-2023	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018-2023
	Pasal 1

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2019	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2021
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.	Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;	Tetap
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;	Tetap
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;	
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;	Tetap
6. Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;	Tetap
7. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masadepan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2019	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2021
daerah dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah;	
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara adalah dokumen: perencanaan pembangunan 1 daerah untuk Periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023;	Tetap
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan; Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun;	Tetap
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;	Tetap
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun;	Tetap
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;	Tetap
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;	Tetap
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk menunjukkan visi dan misi;	Tetap
15. Kebijakan adalah arah dan/atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2019	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2021
16. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar. suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;	Tetap
17. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;	Tetap
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan { input) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.	Tetap
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Maksud dan Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023 adalah:	Tetap
a. sebagai pedoman penyusunan RENSTRA-PD dan RKPD selama tahun 2018-2013; b. sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih; c. sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan Kepala OPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah; d. sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2019	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p>melaksanakan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara;</p> <p>e. menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;</p> <p>f. mendukung terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan;</p> <p>g. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergitas baik antar wilayah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;</p> <p>h. menjamin ketertarikan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;</p> <p>i. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;</p> <p>j. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;</p> <p>k. memudahkan monitoring dan evaluasi terhadap hasil capaian kinerja pemerintah daerah baik tahunan maupun lima tahunan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3</p>	<p style="text-align: center;">BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3</p>

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2019	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2021
Ruang lingkup RPJMD meliputi kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk dilaksanakan pada periode 2018-2023.	Tetap
	Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IV SISTEMATIKA ISI DAN URAIAN RPJMD Pasal 4	BAB IV SISTEMATIKA ISI DAN URAIAN RPJMD Pasal 4
(1) Sistematika RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 disusun sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	(1) Sistematika RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 disusun sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2019	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p>BABI IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH</p> <p>BABI V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</p> <p>BABI VI : STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>BABI VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH</p> <p>BABI VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</p> <p>BABI IX : PENUTUP</p>	<p>BABI IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH</p> <p>BABI V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</p> <p>BABI VI : STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>BABI VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH</p> <p>BABI VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</p> <p>BABI IX : PENUTUP</p>
(2) Isi dan uraian RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(2) Isi dan uraian RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V	BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD	PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD
Pasal 5	Pasal 5
(1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD yang telah dituangkan ke dalam Renstra dan Renja PD dilakukan oleh masing- masing pimpinan OPD;	Tetap
(2) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2019	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2021
Pasal 6	
(1) Kepala OPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RPJMD yang telah dituangkan ke dalam Renstra PD dan Renja PD periode sebelumnya;	Tetap
(2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi kinerja pelaksanaan RPJMD berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1);	Tetap
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunan untuk periode berikutnya.	Tetap
Pasal 7	Pasal 7
Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan/atau hasil kajian yang lengkap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	Tetap
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 8	Pasal 8
Setelah berakhirnya RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023, Penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2019	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2021
Pasal 9	Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Ditetapkan di Kendari Pada tanggal 5-3-2019 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, ALI MAZI Diundangkan di Kendari, Pada tanggal 5-3-2019 Pj.SEKRETARIS DAERAH, SARIFUDDIN SAFAA LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 9. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA (11-79/2019)	Ditetapkan di Kendari Pada tanggal 1-11-2021 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, ALI MAZI Diundangkan di Kendari Pada tanggal 1-11-2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA, NUR ENDANG ABBAS LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (8-190/2021)